BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya. Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJMD dan RENJA DPMD Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu, OPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan OPD , kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan OPD. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka DPMD Kabupaten Luwu Timur melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) DPMD yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu ""

Renja DPMD Kabupaten Luwu Timur 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan DPMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- b) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e) Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- l) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
- o) Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan di lingkungan DPMD sesuai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur adalah :

- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan dokumen perencanaan;
- Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan DPMD Tahun 2020;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**
Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.
- BAB V PENUTUP**
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD DPMD. Pada Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melaksanakan 10 program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.130.841.788,- atau sebesar 88,20 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.215.620.163 yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp.1,876,456,050 ,- atau sebesar 97.6 % dari pagu anggaran sebesar Rp.1,923,223,683 - dan belanja langsung sebesar Rp. 6,254,385,738- atau sebesar 85.8 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 7,292,396,480-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut : **(Tabel 2.1)**

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (outputs)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019(Tahun n-3)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019 (n-2)			Target Program dan kegiatan 2020 (Renja SKPD) Tahun n- 1	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2020		SKPD pelaksa
					Target Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2020 (tahun berjalan/n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi target s/d Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran (%)	100								DPMD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	1717	1,391	1,717	1,391	81.0134	1717	4,499	429	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	160	36	36	36	100	36	108	9
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang terbayarkan (Orang)	7	2	2	2	100	2	6	2
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (unit)	151	34	33	34	100	33	101	8
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42	59	27	59	100	27	145	19
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia (Jenis)	8	6	6	6	100	6	18	5
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia (Jenis)	21	6	8	6	75	58	70	0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	280	60	60	60	100	60	180	8

		(Eksemplar)									
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Dos)	1,980	644	946	644	68.07611	946	2,234	232	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah yang dilaksanakan (Kali)	336	136	115	136	100	61	333	13	
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis yang Terbayarkan (Orang)	61	14	14	14	100	18	46	18	
	Penyediaan Penunjang administrasi kesekretariatan	Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD yang terpenuhi (Jenis)	21				#DIV/0!		-		
	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Disusun (Dokumen)	24	4	6	4	66.66667	4	12	1	
	Kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang Dilaksanakan (kali)	1368	162	240	162	67.5	240	564	60	

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi (%)	100					#DIV/0!		-		DPMD
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (Unit)	1					#DIV/0!		-		
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan (Unit)	5					#DIV/0!		-		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia (Paket)	1					#DIV/0!	26	26	0	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan (Jenis)	72	7	10	7	70			14		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	1	1	1	100		1	3	0	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (Unit)	63	8	15	8	53.33333		0	16	8	

	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapatkan Pakaian Dinas, Pakaian Kerja Lapangan dan Hari-hari Tertentu (%)	100					#DIV/0!		-		DPMD
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Aparatur yang Mendapatkan Pakaian Hari-Hari Tertentu (Orang)	30					#DIV/0!		-		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	60					#DIV/0!		-		DPMD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar Perundang-Undangan (Orang)	30	15	16	15	93.75	19	49	0		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Formal (Orang)	20					#DIV/0!		-		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu (%)	100					#DIV/0!		-		DPMD

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (laporan)	12	1	1	1	100	1	3	1	
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (%)	100				#DIV/0!		-		DPMD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (Dokumen)	16	4	4	4	100	5	13	1	
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan kelompok masyarakat yang diberdayakan (%)	100				#DIV/0!		-		DPMD
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa (Lembaga)	11				#DIV/0!	248	248	0	
	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Jumlah posyandu yang mengikuti bimbingan manajemen (Posyandu)	264	11	11	11	100	139	161	20	
	Sosialisasi tentang Pemahaman Program Teknologi Tepat Guna	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan (Kali)	11				#DIV/0!		-		

	Lomba Inovasi Teknologi tepat Guna	Jumlah kelompok teknologi tepat guna yang mengikuti lomba (Kelompok)	23	9	9	9	100	11	29	0
	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna tingkat Nasional yang diikuti (Kali)	2	1	1	1	100	1	3	0
	Sosialisasi dan Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (POSYANTEK) dan Warung Teknologi (WARTEK)	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan tentang pembentukan Pos Pelayanan Teknolgi dan Warung Teknologi (Kali)	11				#DIV/0!		-	
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Cakupan Lembaga Ekonomi Perdesaan yang Dibentuk dan Dikembangkan (%)	90				#DIV/0!		-	
	Failitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan	Partisipasi dalam pelaksanaan gelar TTG Tk. Nasional (Kelompok)	2				#DIV/0!		-	
	Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	Terfasilitasinya Pembentukan BUMDes (BUMDes)	34				#DIV/0!		-	

								#DIV/0!		-	
	Pelatihan keterampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa	Jumlah pengurus BUMDesa yang mengikuti pelatihan (Orang)	496					#DIV/0!	124	124	0
	Pendampingan P2MP	Jumlah Desa yang dilakukan Pendampingan dan Evaluasi (Desa)	495	75	99	75	75.75758		99	249	0
	Fasilitasi pemberian bantuan modal Badan Usaha Milik Desa	Jumlah BUMDesa sehat yang diberikan bantuan modal (BUMDesa)	9					#DIV/0!		-	
	Pendampingan Teknis dan Akses Pemasaran BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang mendapatkan pendampingan teknis dan akses pemasaran BUMDesa (BUMDesa)	248					#DIV/0!	124	124	0
	Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Tingkat Nasional	Jumlah Expo Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang diikuti (Kali)	1	0	0	0		#DIV/0!	1	1	0
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa yang Melibatkan Masyarakatnya dalam Membangun Desa (%)	100					#DIV/0!		-	

	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RPJMDesa (Desa)	11	0	0	0	#DIV/0!			-	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Penguatan Kelembagaan Lokal	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Desa)	10				#DIV/0!			-	
	Evaluasi Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertispasi dalam pembanguan desa (Lembaga)	124	124	124	124	100	124	372	0	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa	Jumlah Pengurus Kelembagaan Masyarakat Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	248				#DIV/0!			-	
	Kerberlanjutan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi program pamsimas (Desa)	65	20	20	20	100	10	50	0	
	Bimbingan Manajemen Terhadap Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu	Jumlah posyandu yang mengikuti bimbingan manajemen (Posyandu)	88	11	11	11	100	139	161	20	
	Peningkatan KapasitasBadan Permusyawaratan Desa (BPD)	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber	700	124	124	124	100	250	498	0	

		daya manusia (Orang)									
	Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Badan Kesejahteraan Desa (BKD) dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam kecamatan	Jumlah BKD dan BKAD yang dibentuk (Lembaga)	74	7	26	7	26.92308	11	25	0	
	Rapat Koordinasi BPD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi BPD yang dilaksanakan (Kali)	8	1	2	1	50	2	4	0	
	Peningkatan Peran Badan Permusyawaratan Desa di Perdesaan	Persentase Meningkatnya Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan	90				#DIV/0!		-		
	Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas (Orang)	372	124	124	124	100	250	498	0	

	Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan (Kali)	2	1	2	1	50	2	4	0
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (%)	100				#DIV/0!		-	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan (Orang)	248				#DIV/0!		-	
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Perencanaan	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam bidang perencanaan (Orang)	124				#DIV/0!	124	124	0
	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang mengikuti pelatihan dalam manajemen pemerintahan desa (Orang)	372	124	124	124	100	45	293	45
	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang terpilih (Orang)	65	45	46	45	97.82609		90	

	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Seleksi Perangkat Desa (Desa)	55	15	15	15	100	15	45	2
	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (Kali)	12	4	4	4	100	124	132	31
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Tahunan Desa (RKP Desa)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait RKP Desa (Kali)	11	124	124	124	100	124	372	0
	Sosialisasi penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Desa (LKPPD dan LKPJ Desa)	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan terkait LKPPD dan LKPJ Desa (Kali)	11	124	124	124	100	124	372	0
	Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang Menyusun RPJM Desa Tepat Waktu (Desa)	66				#DIV/0!	46	46	0
	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase Keikut Sertaan Perempuan Dalam Pembangunan (%)	90				#DIV/0!		-	
	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Meningkatnya pemahaman Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sehat	11				#DIV/0!		-	

		sejahtera di desa (Kecamatan)									
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kelompok Organisasi Perempuan yang mendapat penyuluhan (Kelompok)	139					#DIV/0!		-	
	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif (%)	100					#DIV/0!		-	
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Keluarga Sejahtera yang Mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan (Kelompok)	556	139	139	139	100	139	417	0	
	Peningkatan derajat pendidikan dan keterampilan perempuan dan keluarga	Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan (Kelompok)	557	139	139	139	100	139	417	0	
	Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK yang Dimonitoring dan Dievaluasi (Kelompok)	552	139	138	139	100	139	417	0	

	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa (%)	100					#DIV/0!		-	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undangan tentang Desa	Jumlah Peraturan-Peraturan/Pedoman tentang Desa yang ditetapkan (Pedoman)	20					#DIV/0!		-	
	Program Penataan Wilayah Desa	Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya (%)	80					#DIV/0!		-	
	Fasilitasi Pemekaran Desa	Jumlah Perda yang dibuat terkait Pemekaran Desa (Perda)	3	1	1+1	1	#VALUE!	1	3	1	
	Pendampingan Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang memiliki profil desa yang lengkap dan bisa diakses (Desa)	248	124	124	124	100		248		
	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba Desa Tingkat Provinsi (Desa)	4	1	1	1	100	1	3	0	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa yang baik dan tepat waktu (%)	100					#DIV/0!		-	

	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	umlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa (Desa)	124	124	124	124	100	124	372	0
	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang disusun (Pedoman)	17	3		3	#DIV/0!		6	
	Pendampingan Perdes tentang Pendapatan Desa	Jumlah Desa yang memiliki Perdes tentang Pendapatan Desa (Desa)	124	104		104	#DIV/0!		208	
	Pendampingan Penataan dan Pemanfaatan Aset Desa	Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan terkait Aset Desa (Desa)	124	124		124	#DIV/0!	124	372	0
	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa (Desa)	124	124		124	#DIV/0!		248	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan DPMD Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2022. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut : **(Tabel 2.2)**

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	INDIKATOR KINERJA	IKK	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		TARGET AKHIR 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2021	2022	
1	Persentase lembaga perekonomian desa yang sehat			82.25	85.45	90.32	96.77	100					
2	Jumlah desa mandiri, jumlah desa berkembang , jumlah desa tertinggal			3	3	4	5	6					
				102	106	110	114	118					
				19	15	11	5	0					

3	Jumlah aparaturnya dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes			1798	1860	1860	1860	1860					
				1555	1555	1555	1555	1555					
4	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai dengan standar			4	4	4	4	4					
5	Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang			4	4	4	4	4					

	ditata sesuai standar												
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mewujudkan target kerjanya menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

1. Kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;
2. Efektifitas fungsi dan kelembagaan pemerintah desa ;
3. Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
4. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Refocusing Anggaran akibat pandemi Covid 19.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DPMD Luwu Timur sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kapasitas SDM (pengetahuan, sikap dan keterampilan) dan aparat pemerintah ditingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat ditingkat desa;
2. Belum optimalnya ketersediaan Data Profil Desa sehingga gambaran potensi desa dan tingkat perkembangan desa sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa;
3. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di desa sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pembangunan cenderung menurun;
4. Masih sulitnya mengetahui tingkat perkembangan desa (Desa Swadaya, Swakarya dan Desa Swasembada sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan desa;
5. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES) masih relative sedikit sehingga usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif;
6. Sumber Daya Alam Perdesaan belum dikelola secara maksimal sehingga masyarakat belum merasakan manfaat secara maksimal SDA yang dimiliki;
7. Penyebarluasan teknologi perdesaan yang tepat guna sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal sehingga penggunaan teknologi tepat guna kualitas dan kuantitasnya masih relative sedikit;

8. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum tertata baik sesuai arahan Permendagri no. 5 Tahun 2017.
9. Pemilihan Kepala Desa untuk 62 Desa pada tahun 2022 sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan terkait.
10. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang seperti pelatihan dikurangi untuk mencegah penularan covid 19.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur, maka dilakukan beberapa hal :

1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa melalui pelatihan dan bimbingan teknis pemerintah desa serta memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan;
2. Memberikan pengetahuan dan pendampingan bagi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan keuangan desa;
3. Memantapkan peran Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Masyarakat dalam pembangunan Kawasan perdesaan;
4. Melakukan pemetaan potensi desa melalui sosialisasi tentang pemahaman program teknologi tepat guna serta melaksanakan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
5. Melakukan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa untuk periode 2022 dengan mempersiapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa.
6. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa serta memfasilitasi pemberian bantuan modal kepada Badan Usaha Milik desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja DPMD Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut : **(tabel 2.4)**

TABEL 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	100.962.428	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	100%	71.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	3 Dok	60.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	3 Dok	40.000.000	

			Tepat Waktu			daerah		Tepat Waktu			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	9.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	7.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	7.862.428	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2 Dok	6.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan Kinerja perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	10 Dok	23.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan Kinerja perangkat daerah yang Disusun Tepat Waktu	10 Dok	18.000.000	
	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		Administrasi BMD pada Perangkat Daerah		Persentase capaian administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		

	Penatausahaan BMD pada SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan BMD pada SKPD	4 Dok	10.0000.000	Penatausahaan BMD pada SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan BMD pada SKPD	4 Dok	7.900.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD tepat Waktu	100 %	2.725.206.062	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD tepat Waktu	100%	2.534.489.981	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya Terbayarkan	22 Org	2.671.521.604	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangan nya Terbayarkan	22 Org	2.492.089.981	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat waktu	18 Dok	53.684.458	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat waktu	18 Dok	42.400.000	

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	117.800.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100%	98.307.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang Diadakan	42 Psg	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya yang Diadakan	42 Psg	28.000.000	
	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan data Administrasi Kepegawaian yang Dimuktahirkan	12 Dok	4.500.000	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Laporan data Administrasi Kepegawaian yang Dimuktahirkan	12 Dok	4.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan	2 Org	34.800.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan	2 Org	27.492.000	

	Fungsi		dan Pelatihan			n Tugas dan Fungsi		dan Pelatihan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	21.500.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	16.985.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	3 Org	27.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	3 Org	21.330.000	
	Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah		Persentase Capaian pelayanan Administrasi perkantoran yang Terpenuhi	100%	504.495.050	Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah		Persentase Capaian pelayanan Administrasi perkantoran yang Terpenuhi	100%	334.540.050	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	18 Buah	2.540.050	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	18 Buah	2.540.050	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	22 Buah	3.500.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang disediakan	22 Buah	3.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Bahan Logistik kantor yang Disediakan	16 Jenis	9.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Bahan Logistik kantor yang Disediakan	16 Jenis	7.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	7.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	60 eksp	10.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	60 Eksp	8.500.000	

			disediakan					disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Tamu yang Difasilitasi Kunjungannya	13 Org	8.535.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Tamu yang Difasilitasi Kunjungannya	13 Org	6.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	35 Kali	450.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	35 Kali	300.000.000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur yang Terpenuhi	100%	305.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		persentase Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur yang Terpenuhi	100%	257.833.112	
	Pengadaan Mebel	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Mebel yang Diadakan	11 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Mebel yang Diadakan	11 Unit	12.500.000	

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	7 Unit	80.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang diadakan	7 Unit	50.000.000	
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	195.333.112	
	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	116.442.495	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	115.930.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Surat Masuk Surat Keluar yang Diagendakan	1717 Surat	4.512.495	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Surat Masuk Surat Keluar yang Diagendakan	1717 Surat	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan air yang terbayarkan	36 Rek	48.930.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rekening Telepon, Listrik dan air yang terbayarkan	36 Rek	48.930.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	63.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Org	63.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	111.500.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	102.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	41.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Kendaraan Dinas dan operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	32.000.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	15.000.000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	2 Gedung	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/di rehabilitasi	1 Gedung	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/di rehabilitasi	1 Gedung	25.000.000	
	Program Penataan Desa		Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	100%	140.000.000	Program Penataan Desa		Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	100%	140.000.000	

	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	100%	140.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		Persentase Desa yang baik penataan wilayah desanya	100%	140.000.000	
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Perda yang Dibuat terkait pemekaran Desa	1 Perda	140.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Perda yang Dibuat terkait pemekaran Desa	1 Perda	140.000.000	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang tertib administrasi		1.196.151.718	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang tertib administrasi		645.000.000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100%	1.196.151.718	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			100%	645.000.000	

	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali	26.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan	2 Kali	20.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Peraturan-Peraturan daerah yang ditetapkan terkait tentang desa	4 Perbub	200.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Peraturan-Peraturan daerah yang ditetapkan terkait tentang desa	4 Perbub	100.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang menyusun perencanaan desa (RKP) tepat waktu. Jumlah Desa yang Menyusun RPJMDes tepat waktu	124 Desa 62 Desa	192.257.355s	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang menyusun perencanaan desa (RKP) tepat waktu. Jumlah Desa yang Menyusun RPJMDes tepat waktu	124 Desa 62 Desa	50.000.000	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes	124 Desa	73.193.664	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDes	124 Desa	40.000.000	
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas	372 Org	400.000.000	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas	372 Org	200.000.000	
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang membuat LKPJ dan LKPPD Desa tepat waktu	124 Desa	22.708.661	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang membuat LKPJ dan LKPPD Desa tepat waktu	124 Desa	15.000.000	

	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa	15 Desa	41.992.038	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa	15 Desa	30.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	1 Desa	100.000.000	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	1 Desa	50.000.000	
	Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti peningkatan . jumlah rapat koordinasi BPD yang dilaksanakan	124 Kali 1 Kali	140.000.000	Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti peningkatan . jumlah rapat koordinasi BPD yang dilaksanakan	124 Kali 1 Kali	140.000.000	

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan		1.224.827.427	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan		879.495.873	
	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota			100%	1.224.827.427	Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat		100%		879.495.873	

	a					pelakunya hokum adat yang sama dalam daerah kabupaten /kota					
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hokum adat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pamsimas Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	3 Desa 548 Kader	147.966.034	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hokum adat	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah desa yang mendapatkan Fasilitasi pamsimas Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	3 Desa 548 Kader	120.809. 194	

	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pelaku usaha ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan hasil usaha untuk meningkatkan PAD desa	124 Desa	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah pelaku usaha ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan hasil usaha untuk meningkatkan PAD desa	124 Desa	63.200.000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna	11 Klp	296.185.545	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna	11 Klp	100.000.000	
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan	139 Klp 139 Klp 139 Klp	700.675.848	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan	Kabupaten Luwu Timur	Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan	139 Klp 139 Klp 139 Klp	595.486.679	

			Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan jumlah kelompok PKK yang dimonitoring dan di evaluasi			kesejahteraan keluarga		Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan jumlah kelompok PKK yang dimonitoring dan di evaluasi		
--	--	--	---	--	--	------------------------	--	---	--	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tahapan Penyusunan Renja perangkat daerah 2022 mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat pada kegiatan musrenbang dan forum organisasi perangkat daerah yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan tema “pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi”.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia
2. Penguatan Konektivitas
3. . Nilai Tambah Ekonomi
4. Pemanfaatan Ketahanan energi,pangan dan sumberdaya air
5. Stabilitas Keamanan Nasional

Target pembangunan makro kewilayahan secara nasional pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0%
2. Tingkat Pengangguran sebesar 4,8 – 5,1%
3. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6%
4. Rasio Gini 0,375 – 0,380%
5. Indeks Pembangunan Manusia 72,5%

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2022 dan isu strategis Tahun 2022, serta penyelarasan dengan tema RKP 2022 dan RKPD Kabupaten Luwu Timur 2022 maka tema

pembangunan Kabupaten Luwu Timur adalah **Pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi**. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Kab. Luwu Timur dalam mewujudkan target pembangunan daerah pada tahun 2022 tersebut melaksanakan tujuan dan sasaran yang juga sejalan dengan target Renstra DPMD. Tujuan tersebut antara lain :

1. Mewujudkan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa dalam Pembangunan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Luwu Timur pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dan Lembaga Ekonomi Desa;
2. Meningkatnya Kualitas Keberdayaan Desa.

Tujuan dan sasaran Renja DPMD Tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :
(tabel 3.2)

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD TAHUN 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan	Persentase lembaga perekonomian desa yang sehat	Nilai Ketahanan Ekonomi Desa	Persentase Lembaga perekonomian desa yang sehat	82,25 %
			Berkembangnya status pembangunan desa	Jumlah Desa Mandiri	3
				Jumlah Desa Berkembang	102
				Jumlah Desa Tertinggal	19

				Jumlah Aparatur dan pengurus kelembagaan Desa yang memiliki kompetensi dalam tata Kelola pemdes	Aparatur : 1798 org, pengurus kelembagaan : 1555 org
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	4 lembaga
				Jumlah sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	4 lembaga
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	Rata-rata capaian tujuan renstra		Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Jumlah Score Lakip

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan program dan kegiatan antara lain :

- A. Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD;
 - d. Evaluasi kinerja perangkat daerah
 2. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Sasaran : Berkembangnya status pembangunan desa

1. Penyelenggaraan Penataan Desa dengan sub kegiatan :
 - a. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - d. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

- f. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - g. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- C. Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan :
- a. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - b. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- D. Sasaran : Nilai Ketahanan Ekonomi Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - c. Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - d. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan 4 program , 11 kegiatan dan 44 sub

kegiatan dengan pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp.5.188.596.016,- dengan rincian sebagai berikut : (Tabel 3.3)

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang menyusun perencanaan desa (RKP) tepat waktu Jumlah Desa yang menyusun RPJMDes tepat waktu	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	124 Desa 62 Desa	124 desa	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	192,257,355	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang tepat waktu dalam menyusun peraturan desa tentang APBDesa	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	124 Desa	124 desa	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	73,193,664	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah perangkat desa yang mengikuti peningkatan kapasitas	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	372 Orang	124 desa	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	400,000,000	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang membuat LKPJ dan LKPPD desa tepat waktu	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	124 Desa	124 desa	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	22,708,661	
2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang melaksanakan seleksi perangkat desa	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	15 Desa	124 desa	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	41,992,038	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat provinsi	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	1 Desa	124 desa	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	100,000,000	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Desa yang tertib administrasi	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Peningkatan Jumlah Rapat Koordinasi BPD yang dilaksanakan	desa yang tertib administrasi	Kab. Luwu Timur	100 %	124 Orang 1 Kali	124 desa	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Desa yang tertib administrasi	100 %	140,000,000	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							879,495,873						1,224,827,427	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							879,495,873							1,224,827,427
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	Jumlah Desa yang Mendapatkan Fasilitas Pamsimas Jumlah Kader Posyandu yang Mendapatkan Pembinaan	keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur	100 %	3 Desa 548 Kader	5 klpk	120,809,194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	147,966,034	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	Jumlah pelaku usaha ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dalam pengembangan hasil usaha untuk meningkatkan PAD desa	keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur	100 %	124 Desa	5 klpk	63,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	80,000,000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	Jumlah kelompok masyarakat dalam keikutsertaan pemanfaatan teknologi tepat guna	keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur	100 %	11 Klp	5 klpk	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	296,185,545	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	Jumlah Kelompok Kelembagaan Perempuan yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan Jumlah kelompok kelembagaan perempuan yang mendapatkan penyuluhan dan pembinaan Jumlah Kelompok PKK yang dimonitoring dan evaluasi	keikutsertaan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa	Kab. Luwu Timur	100 %	139 Klp 139 Klp 139 Klp	5 klpk	595,486,679	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan	100 %	700,675,848
TOTAL										5,188,596,016					6,652,215,130		

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) direncanakan melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 44 subkegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.188.596.016,- Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini : **(Tabel 4)**

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN DPMD 2022

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	71.000.000	PAD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	3 Dok	40.000.000	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	7.000.000	PAD
				PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dok	6.000.000	PAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok	18.000.000	PAD
	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100%	7.900.000	PAD
	Penatausahaan BMD pada SKPD	4 Dok	7.900.000	PAD
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.534.489.981	PAD
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	22 Org	2.492.089.981	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	18 Dok	42.400.000	PAD

	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98.307.000	PAD
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 Psg	28.000.000	PAD
	Pendataan dan Pegolahan Administasi Kepegawaian	12 Dok	4.500.000	PAD
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Org	27.492.000	PAD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Org	16.985.000	PAD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Org	21.330.000	PAD
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	334.540.050	PAD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	18 Buah	2.540.050	PAD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 Buah	3.500.000	PAD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16 Jenis	7.000.000	PAD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	7.000.000	PAD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	60 Eksp	8.500.000	PAD
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13 Org	6.000.000	PAD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Kali	300.000.000	PAD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	257.833.112	PAD
	Pengadaan Mebel	11 Unit	12.500.000	PAD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit	50.000.000	PAD
	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	195.333.112	PAD
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	115.930.000	PAD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1717 Surat	4.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	36 Rek	48.930.000	PAD

	Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Org	63.000.000	PAD
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	102.000.000	PAD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13 Unit	32.000.000	PAD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	31 Unit	15.000.000	PAD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Gedung	30.000.000	PAD
	Program Penataan Desa	1 Gedung	25.000.000	PAD
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	140.000.000	PAD
	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	100%	140.000.000	PAD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Perda	140.000.000	PAD
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		645.000.000	PAD
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	645.000.000	PAD
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	2 Kali	20.000.000	PAD
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan Desa	4 Perbub	100.000.000	PAD
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	124 Desa 62 Desa	50.000.000	PAD
	Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	124 Desa	40.000.000	PAD
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	372 Org	200.000.000	PAD
	Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	124 Desa	15.000.000	PAD
	Fasilitasi Penyusunan profil Desa	15 Desa	30.000.000	PAD
	Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1 Desa	50.000.000	PAD
	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	124 Kali 1 Kali	140.000.000	PAD
	Kegiatan Pemberdayaan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan desa lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta		879.495.873	PAD

	pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota			
	Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat	100%	879.495.873	PAD
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Desa 548 Kader	120.809.194	PAD
	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	124 Desa	63.200.000	PAD
	Fasilitasi Tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	11 Klp	100.000.000	PAD
		139 Klp 139 Klp 139 Klp	595.486.679	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 telah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2026. Dimana Renja Tahun 2022 memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2022 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini dibuat agar seluruh jajaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur dapat menghayati dan menjadi acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Keberhasilan yang sudah tertuang dalam renja ini tidak terlepas dari sinergitas, kerjasama dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan termasuk partisipasi aktif dari masyarakat. Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan demi perbaikan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Juli 2022
Kepala Dinas PMD

HALSEN, S.IP.M.M
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19720424 199203 1 004